

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

ULFA CHAERUNNISA SUNARDI AWARI



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ULFA CHAERUNNISA SUNARDI AWARI
A11111022



Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun oleh:

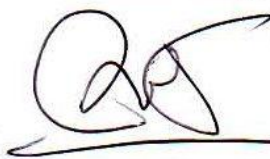
ULFA CHAERUNNISA SUNARDI AWARI

A11111022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

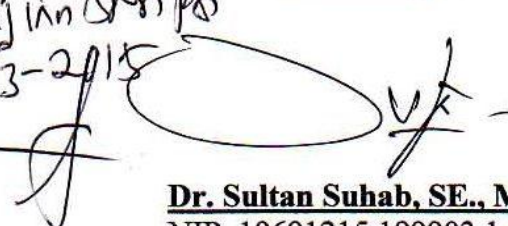
Makassar, 06 Maret 2015

Pembimbing I



Dr. Agussalim, SE., M.Si
NIP. 19670817 199103 1 006

Pembimbing II



revisi skripsi
6/3-2015

Dr. Sultan Subab, SE., M.Si
NIP. 19691215 199903 1 002

**Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin**



Drs. Muh. Yusri Zamhuri, MA., PhD
NIP. 19610806 198903 1 004

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN


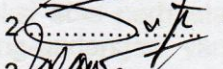

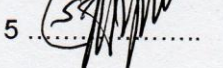
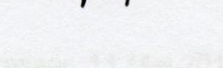
Disusun dan diajukan oleh:

ULFA CHAERUNNISA SUNARDI AWARI
A111 11 022

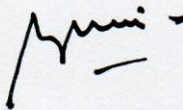
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **14 April 2015** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Agussalim, SE., M.Si	Ketua	1 
2.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si	Sekretaris	2 
3.	Dr. Nursini, SE., M.Si	Anggota	3 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si	Anggota	4 
5.	Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si	Anggota	5 

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Drs. Muh. Yusri Zamhuri, MA., PhD
NIP. 19610806 198903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : ULFA CHAERUNNISA SUNARDI AWARI

NIM : A11111022

jurusan/program studi : ILMU EKONOMI/STRATA SATU (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dengan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Mei 2015

Yang Membuat Pernyataan,

ULFA CHAERUNNISA SUNARDI AWARI

PRAKATA

Puji syukur dan kemuliaan yang agung penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas Rahmat, Anugerah dan Perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan baik. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. Muh.Yusri Zamhuri, MA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. H. Agussalim, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sultan Suhab, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Penguji Ibu Dr. Nursini, SE., M.Si , Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si , dan Ibu Dr. Hj. Sri Undai Nubayani, SE., M.Si. terimah kasih atas saran dan ilmunya sehingga saya dapat memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada peneliti

selama perkuliahan. Dan seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu selama ini.

6. Bapak dan Ibu pada Badan Pusat Statistik, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan dan penyediaan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman Regalians (helki, emy, adilah, mimi, alfi, idha, nana, ria, tuti, wiwik, greys, jihan, akki, ody, dayat dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya) yang selalu memberi semangat, dukungan, bantuan, dan doa. Untuk sahabat yang selalu membawa ke jalan jannah terima kasih Al-Banna (marwah, nidia, uni, nila, rini) doa dan dukungan kalian begitu luar biasa. Untuk kanda-kanda dan adik-adik HIMAJIE terkhusus kanda spultura (kak eva, kak celli, kak wawan, kak ira, kak faje', kak fuad, kak muti, kaki ifi, kak roni, dan kak vina) terima kasih atas bantuannya.
8. Untuk saudara-saudaraku BDP Crew I/4 (kak alif, kak dayat, kak ocing, afiq, dan enun) terima kasih telah menjadi saudara yang selalu setia membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman KKN 87 Kec. Bengo Kab. Bone (kak cacing, kak hajir, kak fian, irna, amel, isdar, astang, lebu, herlin, nicha dan yang terspecial abang alfian marwan) terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa kalian.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis.

Makassar, 11 Mei 2015

ULFA CHAERUNNISA SUNARDI AWARI

Kupersembahkan kepada:

Orang tuaku,

Almarhumah Ibu Dra. Hartati dan almarhum Ayah Ir. E. Sunardi Awari terimakasih atas limpahan kasih sayang yang telah kalian berikan, nasehat-nasehat yang sangat berharga akan selalu ku ingat, maaf belum bisa membalas segala pengorbananmu, belum bisa membuatmu bangga, belum bisa membuatmu bahagia, semoga kalian mendapat tempat terindah di sisi Allah SWT dan suatu saat kelak kita depertemukan kembali di surga-Nya, aamiin.

Kepada Ibu Dra. Masrah Hasan, terima kasih kau tetap setia menjadi satu-satunya orang tua yang senantiasa memberi dukungan dan doa.

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ulfa Chaerunnisa Sunardi Awari
H. Agussalim
Sultan Suhab

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah dalam urusan belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan panel data selama periode tahun 2009-2013 dengan metode regresi berganda. Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program EViews 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 97% variasi variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya 3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model estimasi. Variabel belanja pendidikan (X_1) dan belanja ekonomi (X_3) tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Belanja kesehatan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

ABSTRACT

INFLUENCE OF GOVERNMENT COST TO HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Ulfa Chaerunnisa Sunardi Awari
H. Agussalim
Sultan Suhab

This research aims to analyze how much the influence of local government cost in case of education cost, health cost and economic cost to the human development index of South Sulawesi province. Using data panel during period 2009-2013 with double regression method. Data calculation of this research use Eviews 8 programs. Result of this research shows that 97% variation independent variable can explain variable of human development index in South Sulawesi, whereas the rest of the result 3% that influenced by other factors out of estimation model. Variable of education cost (X_1) and economic cost (X_3) are not significant to human development index in South Sulawesi province. Health cost (X_2) has a positive affected and significant to human development index in South Sulawesi province.

Keywords: Education cost, health cost, economic cost and Human Development Index (HDI)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teoritis.....	8
2.1.1 Pembangunan Manusia	8
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	10
2.1.2.1 Metode Perhitungan Indeks Pembangunan	
Manusia (IPM) dan Komponennya.....	12
2.1.3 Belanja Pemerintah	15
2.1.4 Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan	19

2.1.5 Belanja Pemerintah di Sektor Kesehatan.....	22
2.1.6 Belanja Pemerintah di Sektor Ekonomi.....	24
2.1.7 Hubungan Belanja Pemerintah (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	26
2.2 Tinjauan Empiris	31
2.3 Kerangka Pemikiran	33
2.4 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Lokasi Penelitian	36
3.2 Jenis dan Sumber Data	36
3.3 Metode Analisis Data	36
3.4 Uji Kesesuaian	38
3.4.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	38
3.4.2 Uji F Statik	39
3.4.3 Uji t Statik	39
3.4 Definisi Operasional Variabel	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	41
4.1.1 Kondisi Geografis Daerah Penelitian	41
4.1.2 Perkembangan Demografis Daerah Penelitian	44
4.1.3 Perkembangan Perekonomian Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2013.....	45
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	50
4.2.1 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 ...	50
4.2.1.1 Perkembangan Indikator Angka Melek Huruf	

dan Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	53
4.2.1.2 Perkembangan Indikator Angka Harapan Hidup Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	56
4.2.1.3 Perkembangan Indikator Daya Beli Masyarakat (<i>Purchasing Power Parity</i>) Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	58
4.2.2 Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	60
4.2.2.1 Perkembangan Belanja Pendidikan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	60
4.2.2.2 Perkembangan Belanja Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	62
4.2.2.3 Perkembangan Belanja Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	63
4.3 Hasil Analisis Ekonometrika	65
4.4 Analisis Hasil	66
4.5 Pembahasan	68
4.5.1 Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	69
4.5.2 Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	73
4.5.3 Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	74

BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013
	5
2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM.....
	15
4.1	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013
	43
4.2	Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2009-2013
	44
4.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (juta rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013
	47
4.4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Rupiah)
	48
4.5	PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (Rupiah)
	50
4.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013
	51
4.7	Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013
	54
4.8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013
	55
4.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013
	57
4.10	Daya Beli Masyarakat (<i>Purchasing Power Purity</i>) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013
	59

4.11	Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)	61
4.12	Perkembangan Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)	63
4.13	Perkembangan Belanja Bidang Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)	64
4.14	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2013	67
4.15	Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Tahun 2012-2013	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	35
2.2	Kerangka Pemikiran Dengan Hasil Estimasi	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Hasil Rekap Data	85
2	Penentuan Model Analisis	88
2a	Hasil Uji Chow Test	88
2b	Hasil Uji Hausman Test	88
2c	Hasil Pengujian Perhitungan Statistik Pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 Terhadap Y_1	89
3	Surat Bukti Penelitian (BPS Provinsi Sulawesi Selatan)	92
4	Biodata	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perencanaan pembangunan dewasa ini, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (UNDP, 1990). Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang senantiasa memperhatikan pembangunan dalam negaranya. Unsur pembangunan yang mendukung kemajuan dari sebuah negara diantaranya adalah sumber daya manusia. Jika suatu negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi minim sumber daya manusia, maka akan sulit untuk memajukan negaranya. Tetapi sumber daya manusia yang baik tentunya akan dapat mengelola kekayaan yang dimiliki suatu negara dengan baik pula. Sebagaimana tujuan pembangunan manusia adalah menciptakan suatu lingkungan bagi manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat, dan kreatif (UNDP, 2003).

Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah; *pertama*, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. *Kedua*, banyak negara maju yang

mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti; penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia (Wahid, 2012).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menetapkan sebuah tolak ukur yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM merupakan suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator, yaitu; angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Indeks Pembangunan Manusia ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India *Amartya Sen* dan *Mahbub ul Haq* seorang ekonom Pakistan dibantu oleh *Gustav Ranis* dari *Yale University* dan *Lord Meghnad Desai* dari *London School of Economics*.

Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Hal tersebut dimulai sejak terjadinya desentralisasi keuangan melalui

otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001. Otonomi daerah mulai ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004 dan UU No. 34/2004.

Jika diingat pada masa pemerintahan orde baru, kepengurusan menyangkut pemerintahan dan keuangan masih terpusat. Sejak otonomi daerah itulah desentralisasi kepengurusan daerah terjadi. Desentralisasi adalah bagaimana setiap daerah mampu mengelola anggaran pembangunan serta seluruh aspek ekonomi secara mandiri. Menurut Mardiasmo (2002), secara teoritis desentralisasi akan menghasilkan dua manfaat nyata, antara lain (1) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. (2) Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan

manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Hari, 2009).

Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Apabila IPM mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (Widodo dkk, 2011).

Desentralisasi keuangan yang diberikan pemerintah tentunya memberi ruang untuk pemerintah dapat lebih bijak mengalokasikan dana anggaran daerah untuk keperluan pembangunan manusia di daerahnya masing-masing. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai. Perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, bahkan kultur yang dimiliki tiap daerah tentunya memerlukan penanganan yang berbeda. Sehingga dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi, tujuan pembangunan manusia melalui anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dapat tercapai. Masing-masing daerah otonom diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan

daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pengeluaran dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah (Vegirawati, 2012).

Di Indonesia bagian timur, Provinsi Sulawesi Selatan disorot sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dana Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor-sektor penunjang pembangunan manusia seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga turut mengalami peningkatan anggaran.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009-2013

Tahun	IPM
2009	70,94
2010	71,62
2011	72,14
2012	72,7
2013	73,28

Sumber : Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tabel 1.1 sejak tahun 2009 IPM provinsi Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 70,94 persen terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2013 mencapai angka 78,24 persen. Jika dilihat berdasarkan pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan, maka secara umum dapat dikatakan peningkatannya sejalan dengan peningkatan anggaran belanja pembangunan. Peningkatan yang terjadi pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pastinya terbentuk dari pencapaian IPM kabupaten/kota. Sektor pendukung dimensi IPM yang terkandung dalam

anggaran belanja pembangunan seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tentunya juga memegang peranan. Kebutuhan yang berbeda pada tiap daerah kabupaten/kota juga membuat perbedaan pengalokasian anggaran dan tentunya juga berimbas pada pencapaian IPM. Walaupun angka IPM tersebut mengalami peningkatan, namun pencapaian tersebut masih jauh dan belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 yang menargetkan Sulawesi Selatan masuk 10 besar provinsi dengan nilai IPM tertinggi secara nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah dalam urusan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah dalam urusan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta menyelaraskan apa yang di dapat selama kuliah dengan yang terjadi.
2. Sebagai masukan atau informasi kepada para pengambil kebijakan pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta instansi terkait dalam menentukan langkah-langkah kebijakan agar dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
3. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pembangunan Manusia

Pada dasarnya konsep pembangunan manusia adalah meletakkan manusia sebagai pusat pembangunan dengan upaya dilakukan perbaikan riil dalam hidup manusia di samping materi yang mengukur pendapatan atau kesejahteraan. Di bawah paradigma ini maka pertumbuhan ekonomi adalah perlu (*necessary*) tetapi bukan kondisi yang cukup (*sufficient*) untuk pembangunan manusia. Hampir dua dekade yang lalu *Human Development Report* memberikan pesan yang jelas bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran pembangunan yang penting namun terbatas dalam menangkap arti pendapatan ke dalam definisi pembangunan manusia yang luas (UNDP, 2003).

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Proses yang memperhatikan penciptaan lingkungan yang mendukung dimana manusia dapat mengembangkan potensi dan berperan produktif secara penuh serta hidup kreatif berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan. Konsep luas dengan banyak dimensi merupakan cara memperluas pilihan manusia. Di antara dimensi kritis dan paling dasar adalah hidup sehat dan panjang, mempunyai akses ke ilmu pengetahuan, dan standar hidup layak. Tanpa dimensi dasar ini, maka

dimensi yang lain seperti kebebasan politik, kemampuan untuk berpartisipasi dalam komunitas, penghargaan diri dan lain-lain tidak dapat dicapai (UNDP, 2003).

Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Pembangunan manusia memiliki dua sisi: *pertama*, fungsi dari keberdayaan manusia dan *kedua*, pemakaian keberdayaan itu untuk keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi (*National Human Development for Balize*, 1997).

Sebagaimana laporan UNDP (2003), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat, tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya yang tidak seluruhnya dapat diukur seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, dan pemerataan antar generasi.

IPM kemudian disempurnakan oleh *United Nation Development Programme* (1990). Alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran bobot manusia saja tidaklah cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan dengan kondisi fisik dan non fisik manusia. Alasannya pembangunan manusia adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan kesehatan, keahlian dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian formulasi IPM diukur dari indeks kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup, rata-rata panjangnya usia penduduk dan kemampuan penduduk untuk baca tulis (melek huruf) serta penghasilan per kepala.

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-

sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju (Patta, 2012).

2.1.2.1 Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya

Penyusunan indeks untuk setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

- 1) Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

$$X_i = \text{indikator komponen IPM ke-}i \text{ (} i = 1,2,3 \text{)}$$

$$X_{\max} = \text{nilai maksimum } X_i$$

$$X_{\min} = \text{nilai minimum } X_i$$

Persamaan di atas akan menghasilkan nilai $0 \leq X_i \leq 1$, untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi $0 \leq X_i \leq 100$.

- 2) Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM)} &= 1/3 X_i \\ &= 1/3 (X_1 + X_2 + X_3) \end{aligned}$$

Dimana:

$$X_1 = \text{indeks angka harapan hidup}$$

$$X_2 = 2/3 (\text{indeks melek huruf}) + 1/3 (\text{indeks rata-rata lama sekolah})$$

X_3 = indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu :

a. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup merupakan salah satu indikator pembangunan manusia. Dalam berbagai publikasi Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesehatan yang menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode *Brass Varian Trussel*). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada angka harapan hidup adalah faktor lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan serta keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan faktor-faktor ini selalu dibahas kaitannya dengan sektor kesehatan. Dengan demikian angka harapan hidup mewakili indikator kesehatan dalam menilai kesejahteraan penduduk.

b. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf/ *Adult Literacy Rate Index* (Lit) dan rata-rata lama sekolah/ *Mean Years Of Schooling Index* (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk

berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

c. Indeks Daya Beli

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan sebagai indikator standar hidup layak. Di Indonesia menggunakan “rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan” atau daya beli yang disesuaikan (*purchasing power parity*).

Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsen IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar

daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi Per Kapita yang Disesuaikan (000)	732,7	300,0 (1996) 360,0 (1999) 300,0 (2000)	UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.3 Belanja Pemerintah

APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak mamadai. Melainkan harus memperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkatkan

pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1997).

Belanja daerah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu; *Pertama*, belanja rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui belanja rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 1994).

Menurut Putri (2011) anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, juga terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dari dalam dan luar negeri yaitu pada saat implikasi di saat pengembalian.

Kedua, belanja pembangunan yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat

menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu (Putri, 2011). Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut formulasi distribusi dan alokasi dari penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijaksanaan fiskal. Di samping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap di tempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan (Putri, 2011).

Belanja pembangunan dibedakan atas belanja pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk program pinjaman. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen, lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang

dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Basri, 2005).

Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan pengairan. Di samping itu juga dilakukan pengadaan prasarana pendukung telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan (Basri, 2005).

Penyusunan belanja pembangunan selalu didasarkan pada kebutuhan nyata dari masyarakat tingkat bawah, untuk menentukan alokasi belanja pembangunan terhadap proyek-proyek yang dibangun, inisiatif harus datang dari masyarakat itu sendiri melalui lembaga pemerintahan yang berada ditingkat bawah. Adapun belanja investasi/pembangunan terdiri dari:

1. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang berupa investasi fisik pembangunan infrastruktur yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
2. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan

datang.

3. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria:

- 1) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan.
- 2) Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
- 3) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.

2.1.4 Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah (Bastias, 2010).

Asumsi yang digunakan dalam teori *human capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori *human capital* dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Bastias, 2010).

Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pasca tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara,

dengan mengisolasi dua faktor, yaitu pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia.

Namun demikian masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai. Namun demikian, pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas (Tomayah, 2004).

Menurut Todaro pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 6 cara yaitu; Meningkatnya secara umum kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan. Meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja. Memungkinkannya penyerapan Informasi baru secara lebih cepat dan penerapan proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien. Menghilangkan hambatan hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi. Beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab individual, kemampuan organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan dalam jangka panjang. Meningkatnya kemampuan manajemen menjadi lebih sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien (Aini, 2008).

Meski modal manusia memegang peranan penting dalam pertumbuhan penduduk, para ahli mulai dari ekonomi, politik, sosiologi bahkan *engineering* lebih menaruh prioritas pada faktor modal fisik dan kemajuan teknologi. Ini beralasan karena melihat data AS misalnya, total kombinasi kedua faktor ini menyumbang sekitar 65 persen pertumbuhan ekonomi AS pada periode 1948-

1979. Namun sesungguhnya faktor teknologi dan modal fisik tidak independen dari faktor manusia. Suatu bangsa dapat mewujudkan kemajuan teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik seperti bangunan dan peralatan mesin-mesin hanya jika negara tersebut memiliki modal manusia yang kuat dan berkualitas (Andrianus, 2003).

Apabila demikian, secara tidak langsung kontribusi faktor modal manusia dalam pertumbuhan penduduk seharusnya lebih tinggi dari angka 31 persen. Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas (Andrianus, 2003).

Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran

pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

2.1.5 Belanja Pemerintah di Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Wahid, 2012).

Membicarakan kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan kesehatan saja, melainkan akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh masyarakat. Secara umum sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah swasta, lembaga kementerian dan pengeluaran langsung oleh rumah tangga terbesar dari segi kualitas pembiayaan kesehatan secara nasional berasal dari pengeluaran rumah tangga. Program-program dibidang kesehatan dan pendidikan lebih berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Situmorang, 2007).

Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor

kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut (Bastias, 2010).

Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan (Bastias, 2010).

Pembangunan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. jadi tingkat kesehatan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan terjaganya kesehatan dengan baik, maka produktivitas kerja akan tinggi sehingga mampu mendapatkan upah atau bayaran yang lebih tinggi pula sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat (Situmorang, 2007).

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003).

Implikasi dari penerapan teori *human capital* dibidang perbaikan gizi dan kesehatan adalah perlunya usaha memerangi kemiskinan. Secara umum kesehatan akan berkorelasi dengan tingkat produktivitas penduduk maupun pekerja. Meningkatnya derajat pada kesehatan akan memperpanjang masa kerja dan daya tubuh yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003).

2.1.6 Belanja Pemerintah di Sektor Ekonomi

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara *agregat* dapat dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) yang rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap totalitas perekonomian maka sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus akan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Musgrave (1950) mengemukakan bahwa kebijakan anggaran (*budget policy*) dapat mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu:

1. *Resources Transfer* (perpindahan sumber daya). Kebijakan anggaran pemerintah berupa perubahan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan terjadi pengalihan/transfer input dari perseorangan (individu/swasta) kepada masyarakat (publik). Kenaikan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang/jasa publik akan meningkatkan penyerapan input yang ada dalam perekonomian sehingga input yang dapat digunakan pihak swasta akan menurun dan sebaliknya. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi input dalam suatu perekonomian.
2. *Incident* (distribusi pendapatan). Perubahan alokasi input akibat perubahan kebijakan pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Pada perekonomian yang sudah mencapai *full employment* jika pengeluaran pemerintah meningkat berarti

transfer input dari swasta kepada penggunaan untuk publik sehingga pendapatan riil swasta akan menurun. Di sisi lain peningkatan pengeluaran tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat (publik) sebagai balas jasa dari peningkatan penggunaan input untuk publik.

3. *Output Effect* (perubahan terhadap output). Menganalisis bagaimana fungsi pajak untuk mengatur pendapatan keuangan sebagai dasar perubahan pajak. Transfer sumber daya untuk digunakan masyarakat juga meningkat. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output dalam suatu perekonomian (*Product Domestic Bruto/PDB*) maupun penerimaan riil. Seperti diketahui perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan adanya perubahan alokasi input yang selanjutnya mempengaruhi output yang akan dihasilkan dalam perekonomian. Perubahan di dalam distribusi dikenal sebagai timbulnya anggaran berimbang. Anggaran berimbang yaitu jumlah yang diambil pemerintah seluruhnya dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian.

2.1.7 Hubungan Belanja Pemerintah (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan investasi dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP semakin menurun. Rostow mengatakan bahwa dalam tingkat lanjut dari pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran atau belanja pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan

mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Basri , 2005).

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah (Tri Haryanto, 2005).

2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Dalam suatu perekonomian apabila perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur

hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Guritno:1991).

Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001).

Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain. Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara.

Investasi publik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia handal yang sehat dan mempunyai daya beli yang baik menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan.

APBD merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta (Vegirawati, 2012).

Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004).

Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah

dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan berapa besar jumlah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum yang diperlukan. Semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk bidang pendidikan dan kesehatan yang ada.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga bantuan dari pemerintah, diharapkan akan mendorong peningkatan alokasi dana untuk mensejahterakan masyarakat. Pengalokasian dana belanja pemerintah untuk kesejahteraan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan.

Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2 Tinjauan Empiris

Priyo Hari Adi dan Fhino Andrea Christy (2009), melakukan penelitian mengenai hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia di Jawa Tengah. Dengan menggunakan regresi sederhana hasilnya menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal, dan belanja modal yang merupakan bagian dari belanja langsung berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia.

Widodo *dkk* (2011) dalam jurnal “Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah”, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa IPM tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengandung makna bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang di-*proxy* dengan IPM harus didukung dengan kebijakan pemerintah melalui alokasi sumber pendanaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang memang ditujukan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kualitas pembangunan manusia, sebagaimana diungkapkan oleh UNDP, terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup.

Sulistio (2012), dalam jurnal “Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan dengan elastisitas negatif sebesar 0,208192 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-

2009. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,208. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah selama tahun 2006-2009.

Mulyaningsih (2008) meneliti tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Indonesia serta melihat hubungan pembangunan manusia terdapat pengurangan kemiskinan 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 65 Panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah disektor publik juga tidak terbukti mempengaruhi kemiskinan, selain itu dalam model ke tiga pembangunan manusia berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka

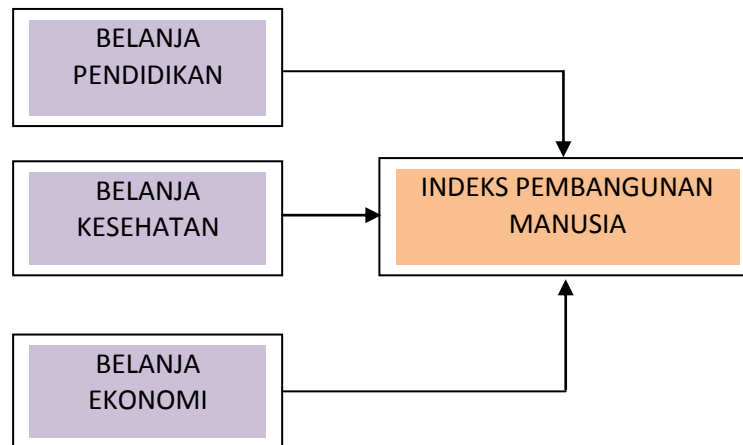
penulis menguraikan landasan berpikir dalam gambar yang dijadikan pegangan dalam penelitian.

Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2001). Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1999).

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Selatan adalah besarnya belanja pemerintah dalam hal ini belanja pendidikan, belanja kesehatan, serta belanja ekonomi karena faktor-faktor ini merupakan faktor yang diyakini berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel-variabel dengan pembangunan manusia, dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat dugaan sementara yaitu : Diduga belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait yang dianggap mewakili ruang lingkup penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, dalam bentuk panel data (*pooled data*) yang menggabungkan data *time series* periode 2009-2013 dan data *cross section* Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Data-data yang dimaksud yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi yang diperoleh dari APBD seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan metode regresi berganda. Metode regresi berganda adalah metode regresi yang melibatkan satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan pengolahan data-data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode *Ordinary Least Square* (metode kuadrat kecil). Metode

ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat (Wagiono, 1994).

Metode untuk menganalisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data panel (*pooled data*) dengan program software *Microsoft Excel* 2003 dan *E-views*. Menurut Gujarati (1978), data panel (*pooled data*) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data *time series* atau *cross section*.

Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode kuadrat terkecil (*pooled least square*), metode efek tetap (*fixed effect*) dan metode efek random (*random effect*). Untuk menentukan salah satu model estimasi data panel dari ketiga model tersebut, maka digunakan uji *Chow Test* dan uji *Haussman Test*. uji *Chow Test* merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect*. Sedangkan uji *Haussman Test* merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Penelitian dengan menggunakan data panel dengan *cross section* 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan *time series* tahun 2009-2013,

$$Y = f (X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (1)$$

Secara ekonometrika model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X_1 = Belanja Pendidikan

X_2 = Belanja Kesehatan

X_3 = Belanja Ekonomi

α = *intercept*/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

μ = *error term*

3.4 Uji Kesesuaian

3.4.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu belanja pendidikan (X_1), belanja kesehatan (X_2), dan belanja ekonomi (X_3) terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi (R^2).

Koefisien Determinasi (R^2) yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel– variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel–variabel dependen. Akan tetapi ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi terjadi bias terhadap satu variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan R^2 , tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai

t yang signifikan). Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

3.4.2 Uji F

Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu belanja pendidikan (X_1), belanja kesehatan (X_2), dan belanja ekonomi (X_3) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (Y).

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *Level of significance* 5 persen, Kriteria pengujiannya apabila nilai F-statistik < F-tabel maka hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F-statistik > F-tabel maka hipotesis diterima yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu.

3.4.3 Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat pada hipotesis berikut: $H_0: \beta_1 = 0$ tidak berpengaruh. $H_1: \beta_1 > 0$ berpengaruh positif, $H_1: \beta_1 < 0$ berpengaruh negatif. Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai

β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y . bila $t_{statistik} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima (signifikan) dan jika $F_{statistik} < F_{tabel}$ maka H_0 ditolak (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Belanja pendidikan (X_1) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai fungsi pendidikan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
2. Belanja kesehatan (X_2) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai fungsi kesehatan yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
3. Belanja ekonomi (X_3) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD untuk membiayai fungsi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. Indeks pembangunan manusia (Y) merupakan indeks komposit yang menggabungkan tiga indikator, yaitu pendidikan (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan Hidup), dan pengeluaran perkapita riil yang dinyatakan dalam angka indeks (0-100).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Gambaran umum penelitian terdiri dari kondisi geografis daerah penelitian, perkembangan demografis dan ketenagakerjaan, serta perkembangan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

4.1.1 Kondisi Geografis Daerah Penelitian

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis, karena terletak di tengah-tengah Kepulauan Indonesia. Tentunya dilihat secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan komparatif, dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, di samping itu Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Posisi Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 116° 48' - 122°36' Bujur Timur dan 0° 12' - 8° Lintang Selatan, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Batas sebelah barat dan selatan masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores. Posisi tersebut menempatkannya sebagai pintu gerbang bagi daerah Sulawesi lainnya bahkan Kawasan Timur Indonesia melalui perhubungan laut (pelabuhan Soekarno-Hatta), darat (titik awal trans-Sulawesi) dan udara (bandar udara Sultan Hasanuddin). Di masa lalu, Makassar yang saat ini sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pelabuhan internasional baik sebelum maupun pada jaman penjajahan, dan ketika Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk pada jaman kemerdekaan. Dengan demikian, dari rentang waktu masa lalu hingga masa kini, posisi sebagai pintu gerbang

Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, bahkan posisi sebagai *center point of Indonesia*, melekat pada provinsi ini.

Provinsi Sulawesi Selatan termasuk daerah yang mengalami pemekaran wilayah secara signifikan pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Sulawesi Selatan awalnya merupakan hasil pemekaran Provinsi Sulawesi pada tahun 1950-an menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara selanjutnya menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat gelombang desentralisasi dan otonomi daerah bergulir di Indonesia pada tahun 2000-an, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pemekaran kabupaten melalui pemecahan Kabupaten Luwu atas Kabupaten Luwu sendiri, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, Kabupaten Polewali Mamasa termekarkan menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa, serta Kabupaten Mamuju termekarkan menjadi Kabupaten Mamuju sendiri dan Kabupaten Mamuju Utara. Pada tahun 2004, Provinsi Sulawesi Selatan mekar dan melahirkan Provinsi Sulawesi Barat yang didalamnya tergabung Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Utara, pada dasarnya acuan pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, maka demikian pula Sulawesi Selatan sangat berhasrat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat luas di wilayah ini.

Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada bagian selatan Pulau Sulawesi memiliki luas wilayah kurang lebih 45.764,53 km², memiliki 24 kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk dapat melihat luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar yakni sekitar 7.502,68 km² atau

16,40 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sementara itu kabupaten/ kota dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Parepare dengan luas sekitar 99,33 km² atau kurang lebih 0,22 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Diantara kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah otonom baru di daerah ini, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 1.151,47 km² atau 2,52 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
1	Kep.Selayar	903,5	1,97
2	Bulukumba	1.154,67	2,52
3	Bantaeng	395,83	0,87
4	Jeneponto	903,35	1,97
5	Takalar	566,51	1,24
6	Gowa	1.883,32	4,12
7	Sinjai	819,96	1,79
8	Maros	1.619,12	3,54
9	Pangkep	1.112,29	2,43
10	Barru	1.174,71	2,57
11	Bone	4.559,00	9,96
12	Soppeng	1.359,44	2,97
13	Wajo	2.516,20	5,5
14	Sidrap	1.883,25	4,12
15	Pinrang	1.961,77	4,29
16	Enrekang	1.786,01	3,9
17	Luwu	2.918,65	6,38
18	Tana Toraja	2.054,30	4,49
19	Luwu Utara	7.502,68	16,4
20	Luwu Timur	7.001,61	15,3
21	Toraja Utara	2.054,30	4,49
22	Makassar	175,77	0,38
23	Pare Pare	99,33	0,22
24	Palopo	247,52	0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (diolah)

4.1.2 Perkembangan Demografis Daerah Penelitian

Kondisi demografi Provinsi Sulawesi Selatan ditandai pertumbuhan penduduk yang positif dan populasi yang terus bertambah. Dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, seperti pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat sebanyak 7.815.630 jiwa. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 8.267.127 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2009-2013

No.	Kabupaten/kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kep.Selayar	121.749	122.055	123.283	124.553	283.307
2	Bulukumba	394.746	394.560	398.531	400.990	404.896
3	Bantaeng	174.176	176.699	178.477	179.505	181.006
4	Jeneponto	334.175	342.700	346.149	348.138	351.111
5	Takalar	257.974	269.603	272.361	275.034	280.590
6	Gowa	617.317	652.941	659.512	670.465	696.096
7	Sinjai	228.304	228.879	231.182	232.612	234.886
8	Maros	306.687	319.002	322.212	325.401	331.796
9	Pangkep	298.701	305.737	308.814	311.604	317.110
10	Barru	162.985	165.983	167.653	168.034	169.302
11	Bone	711.748	717.682	724.905	728.737	734.119
12	Soppeng	230.744	223.826	226.079	226.202	225.512
13	Wajo	381.066	385.109	388.985	389.552	390.603
14	Sidrap	252.483	271.911	274.648	277.451	283.307
15	Pinrang	351.042	351.118	354.652	357.095	361.293
16	Enrekang	190.576	190.246	192.163	193.683	196.394
17	Luwu	328.180	332.482	335.828	338.609	343.793
18	Tana Toraja	240.249	221.081	223.306	224.523	226.212
19	Luwu Utara	229.090	287.472	290.365	292.765	222.393
20	Luwu Timur	237.354	243.069	245.515	250.608	263.012
21	Toraja Utara	229.090	216.762	218.943	220.304	222.393
22	Makassar	1.271.870	1.338.663	1.352.136	1.369.606	1.408.072
23	Pare Pare	118.842	129.262	130.563	132.048	135.192
24	Palopo	146.482	147.932	245.515	250.608	263.012

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (diolah)

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Makassar merupakan ibukota provinsi, yakni sebanyak 1.408.072 jiwa atau 17,03 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya daerah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua, yakni Kabupaten Bone dengan jumlah penduduk sebanyak 734.119 jiwa atau 8,88 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah dengan penduduk terbanyak ketiga adalah Kabupaten Gowa dengan jumlah penduduk sebanyak 696.096 jiwa atau 8,42 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Tabel 4.2 menunjukkan juga bahwa pada tahun 2013 daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni sebanyak 127.220 jiwa atau 1,54 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya daerah dengan jumlah penduduk jumlah penduduk paling sedikit setelah kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Pare-pare dengan jumlah penduduk sebanyak 135.192 jiwa atau 1,63 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan.

4.1.3 Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2013

Perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan fluktuatif namun terus meningkat dengan pencapaian di atas rata-rata nasional. Sebagaimana dalam kurun waktu 2009-2013, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, namun dengan laju yang lebih tinggi. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan tahun-tahun terakhir ini menjadikan perekonomian wilayah ini akan memburu ketertinggalannya. Di samping itu, dengan pertumbuhan tinggi tersebut, Sulawesi

Selatan diharapkan mampu mengelola perekonomian wilayah Pulau Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka salah satu indikator untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah melalui PDRB. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berarti bahwa nilai PDRB dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa yang berlaku pada tahun dasar. Maksud perhitungan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan rill ekonomi yang nilainya telah terbebas dari pengaruh harga baik inflasi maupun deflasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasil dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. Selama periode 2009-2013 nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 yang memberikan informasi mengenai besaran Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota dan Kota Makassar masih menjadi pemasok terbesar dalam PDRB Sulawesi Selatan.

Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2013, sebesar 32,66 persen perekonomian Sulawesi Selatan terpusat di jantung ibukota Sulawesi Selatan. Data menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan tren positif. Terlihat bahwa PDRB yang diterima masing-masing kabupaten/kota semakin meningkat setiap tahunnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kota Makassar adalah penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang dihitung atas dasar harga berlaku, terlihat pada Tabel 4.3 pada tahun 2009 Kota Makassar

jauh mengungguli PDRB Kabupaten/Kota lainnya dan berhasil mendapatkan sebesar Rp 31.263.651,66 dan semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp 58.802.552,51 pada tahun 2013. Daerah yang mendapatkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku periode 2009-2013 terendah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar yang hanya mendapatkan sebesar Rp 917.280,09 pada tahun 2009 dan Rp 2.015.889,46 pada tahun 2013. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan peningkatan dengan tren positif setiap tahunnya.

Tabel 4.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Belaku Menurut
Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bantaeng	1.532.910,58	1.831.773,14	2.180.708,61	2.536.709,90	2.950.882,41
2	Barru	1.440.923,92	1.665.901,72	1.904.306,68	2.189.892,65	2.503.113,80
3	Bantaeng	6.412.649,40	7.530.369,81	8.835.528,87	10.372.888,63	11.788.865,91
4	Barru	3.255.210,15	3.763.053,25	4.286.358,33	5.044.765,06	5.830.501,33
5	Bantaeng	1.614.215,19	1.921.392,87	2.291.755,53	2.680.809,01	3.316.559,41
6	Barru	4.309.671,23	5.082.230,41	5.931.369,84	6.791.070,31	7.832.780,08
7	Bantaeng	1.872.776,87	2.273.511,88	2.676.051,41	3.095.249,98	3.551.624,63
8	Barru	3.195.646,47	3.717.632,93	4.351.150,40	5.030.495,95	5.784.726,16
9	Luwu Utara	2.678.044,35	3.068.339,43	3.570.912,84	4.155.740,10	4.851.431,13
10	Maros	2.153.006,96	2.598.067,30	3.039.190,92	3.495.957,22	4.018.383,57
11	Pangkep	4.597.963,04	6.379.302,84	6.413.121,20	7.676.581,32	8.898.027,98
12	Pinrang	4.492.956,91	5.290.607,32	6.216.631,34	7.237.528,74	8.261.557,75
13	Selayar	917.280,09	1.131.776,13	1.386.060,85	1.709.076,56	2.015.889,46
14	Sidrap	2.944.140,55	3.366.701,75	4.215.957,04	4.932.509,64	5.462.352,81
15	Sinjai	2.395.566,65	2.813.762,88	3.235.344,23	3.716.149,62	4.284.745,80
16	Soppeng	2.316.917,25	2.728.359,73	3.209.370,07	3.690.683,88	4.254.982,77
17	Takalar	1.837.602,23	2.055.096,87	2.386.106,51	2.749.769,82	3.130.961,46
18	Tana toraja	1.259.215,83	1.471.969,78	1.794.453,29	2.190.123,46	2.568.003,03
19	Wajo	4.664.693,50	5.409.457,65	6.655.973,93	7.736.092,89	8.941.540,52
20	Pare-pare	1.519.156,10	1.795.963,76	2.073.555,92	2.376.530,24	2.771.804,96
21	Makassar	31.263.651,66	37.007.451,92	43.428.149,82	50.702.400,56	58.802.552,51
22	Palopo	1.646.987,34	1.946.847,77	2.284.801,89	2.637.545,42	3.081.642,00
23	Luwu timur	6.416.034,42	8.294.255,58	9.670.171,43	10.446.649,61	12.789.845,56
24	Tana toraja	1.263.745,18	1.499.236,90	1.821.421,55	2.204.393,74	2.611.378,06
	Sulawesi Selatan	99.954.589,75	117.862.210,18	137.519.771,93	159.859.931,38	184.783.059,05

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (diolah)

Secara agregat, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten selama kurung waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan telah mengolah sumber daya dan seluruh potensi yang dimiliki dengan efisien. Hal ini juga akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh para pemerintah daerah masing-masing Kabupate/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.4
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bantaeng	8.728.416	10.331.548	12.210.288	14.307.525	16.302.677
2	Barru	8.723.197	10.004.214	11.368.249	13.150.929	14.784.904
3	Bantaeng	8.985.077	10.458.861	12.188.231	14.406.810	16.058.522
4	Barru	8.304.680	9.507.702	10.742.753	12.746.065	14.399.997
5	Bantaeng	8.557.801	10.063.706	11.885.343	14.041.310	16.887.478
6	Barru	6.723.419	7.759.391	8.867.681	10.368.395	11.252.442
7	Bantaeng	5.498.174	6.612.737	7.727.270	9.002.845	10.115.390
8	Barru	9.698.354	11.147.425	12.911.847	15.048.082	16.826.189
9	Luwu Utara	9.399.879	10.639.512	12.253.745	14.410.089	16.317.588
10	Maros	6.822.748	8.116.348	9.337.411	10.921.351	12.111.007
11	Pangkep	15.187.789	17.538.326	20.668.286	25.028.222	28.059.752
12	Pinrang	12.891.200	15.022.239	17.496.261	20.550.361	22.866.642
13	Selayar	7.600.677	9.248.275	11.168.543	13.965.668	15.845.696
14	Sidrap	10.949.482	12.340.920	15.257.130	18.080.517	19.916.037
15	Sinjai	10.535.799	12.255.972	13.980.098	16.186.519	18.241.810
16	Soppeng	10.360.170	12.148.883	14.276.303	16.433.935	18.868.099
17	Takalar	6.890.922	7.597.653	8.646.164	10.165.846	11.158.493
18	Tana toraja	5.728.578	6.635.995	8.038.821	9.873.605	11.352.196
19	Wajo	12.148.525	14.002.386	17.162.755	20.024.883	22.891.633
20	Pare-pare	11.900.669	13.848.983	15.766.808	18.325.830	20.502.729
21	Makassar	23.690.417	27.559.380	31.816.543	37.757.982	41.761.041
22	Palopo	11.409.601	13.119.362	14.975.139	17.773.816	19.162.176
23	Luwu timur	27.013.744	34.019.481	38.646.213	42.925.608	48.628.373
24	Tana toraja	5.868.904	6.892.948	8.313.805	10.135.004	11.742.177

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (diolah)

Selain Produk Domestik Regional Bruto, adapula indikator lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah yaitu nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional, PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Maka, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari total PDRB dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Perkembangan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 4.4.

Pada analisis sebelumnya, yaitu PDRB Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku, disebutkan bahwa Kota Makassar merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Walaupun dengan jumlah pendapatan daerah yang sangat tinggi, tidak mencerminkan pendapatan perkapita yang di Kota Makassar juga tinggi. Pendapatan perkapita tertinggi sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kabupaten Luwu Timur. Kondisi demografis Kabupaten Luwu Timur yang memiliki luas lahan terluas kedua di Sulawesi Selatan, semakin memberikan kesempatan terhadap Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan nilai pendapatan perkapita yang sangat tinggi.

Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang menduduki posisi terendah untuk pendapatan perkapita sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 walaupun setiap tahunnya terus menunjukkan progresif yang cukup baik. Dengan adanya data PDRB perkapita ini, setidaknya sudah ada gambaran bahwa terjadi peningkatan kemampuan ekonomi pada masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan selama kurung waktu 2009-2013.

Hal yang berbeda dengan Kota Makassar, walaupun PDRB yang dicapai cukup tinggi setiap tahunnya, namun kepadatan penduduk di Kota Makassar merupakan yang terpadat di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itulah yang membuat nilai PDRB perkapita di Kota Makassar lebih rendah.

Data pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan berdasarkan lapangan usaha terus mengalami peningkatan, sektor yang mengalami peningkatan paling besar adalah sektor, yakni meningkat sebesar persen selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.5
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (Rupiah)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	13.528	13.809	14.737	15.533	16.145
Pertambangan dan Penggalian	3.852	4.491	4.170	2.290	4.688
Industri Pengolahan	6.468	6.869	7.394	8.050	8.704
Listrik dan Air Bersih	490	529	575	648	702
Bangunan	2.656	2.900	3.250	3.567	3.957
Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.792	8.698	9.631	10.661	11.661
Pengangkutan dan Komunikasi	4.023	4.619	5.179	5.950	6.480
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.203	3.742	4.297	4.979	5.685
Jasa-jasa	5.308	5.535	5.897	6.041	6.262
PDRB	47.326	51.197	50.837	59.718	64.284

Sumber : Publikasi BPS Sulawesi Selatan tahun 2009-2013

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi sangat besar pada perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar Rp 16.145 pada tahun 2013. Selanjutnya sektor yang mengalami peningkatan terbesar kedua setelah sektor pertanian selama lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, yakni sebesar Rp 11.661 pada tahun 2013.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan

pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan agar meningkat usia hidup panjang dan sehat dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis) dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi.

Tabel 4.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Tahun					Kategori pada tahun 2013
	2009	2010	2011	2012	2013	
Kep.Selayar	68.86	69.34	70.00	70.49	71.00	Menengah atas
Bulukumba	70.55	71.19	71.77	72.33	73.21	Menengah atas
Bantaeng	69.40	70.10	70.10	71.51	72,22	Menengah atas
Jeneponto	64.54	64.92	65.27	65.56	66.22	Menengah atas
Takalar	68.04	68.62	69.09	70.14	70.77	Menengah atas
Gowa	70.00	70.67	71.29	71.60	72.12	Menengah atas
Sinjai	69.21	69.53	70.16	70.64	71,45	Menengah atas
Maros	70.55	71.12	71,74	72.54	73,48	Menengah atas
Pangkep	69.07	69.43	69.89	70.65	71.26	Menengah atas
Barru	70.30	70.86	71.19	71.70	72.16	Menengah atas
Bone	69.63	70.17	70.77	71.47	72,08	Menengah atas
Soppeng	71.26	71.89	72.23	72.23	73.31	Menengah atas
Wajo	69.44	70.22	71.04	71.67	72.55	Menengah atas
Sidrap	72.06	72.37	72.74	73.36	74.05	Menengah atas
Pinrang	72.61	73.21	73.80	74.39	74,87	Menengah atas
Enrekang	74.19	74.19	74.84	75.30	75.67	Menengah atas
Luwu	73.59	73.98	73.98	74.68	75,33	Menengah atas
Tana Toraja	71.39	71.84	72,29	72.90	73,76	Menengah atas
Luwu Utara	73.65	74.32	74.69	74.97	75.36	Menengah atas
Luwu Timur	72.29	72.79	73.11	73,56	73.96	Menengah atas
Toraja Utara	68.92	69.56	70,15	71.04	71.69	Menengah atas
Makassar	78.24	78.79	79,11	79,49	80,17	Tinggi
Pare Pare	77,45	77.78	78,19	78.63	79.02	Menengah atas
Palopo	76,11	76,55	76.85	77.28	77.70	Menengah atas
Sulawesi Selatan	70,94	71,6	72,14	72,70	73,28	Menengah atas

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 (diolah)

Komponen-komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Kemampuan Daya Beli (PPP) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi suatu daerah yang ditunjukkan oleh besar kecilnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tabel 4.6 menampilkan *performance* pembangunan manusia yang perlihatkan dengan angka IPM.

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2013 secara umum terjadi kenaikan angka IPM setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir. Rata-rata pencapaian IPM kabupaten/kota selama tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah 72,35. Pada tahun 2013 angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 73,28 masih berada dibawah angka indeks pembangunan manusia nasional yang sebesar 73,29. Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa tiga besar daerah yang memiliki indeks pembangunan tertinggi di atas indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Sedangkan tiga besar daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia terendah di bawah indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Selayar.

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$), kategori menengah bawah ($50 \leq IPM < 66$), dan kategori rendah ($IPM < 50$). Berdasarkan kriteria tersebut maka daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 merupakan daerah dengan IPM kategori menengah tinggi. Daerah dengan pencapaian angka IPM terendah di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kabupaten Jeneponto dengan rata-rata IPM sebesar 65,30. Hal ini disebabkan oleh angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup yang terendah dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Provinsi

Sulawesi Selatan. Daerah dengan capaian angka IPM tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kota Makassar. Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sehingga sarana dan prasana pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi cukup memadai. Angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli kota merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 hingga 2013.

4.2.1.1 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Hanya negara yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang akan mampu bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi seperti saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan merupakan salah satu elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya dan akan semakin mampu menghadapi persaingan di era globalisasi.

Angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah merupakan penunjang indeks pendidikan dan bagian dari komponen pembangunan manusia. Pembangunan di bidang pendidikan akan membawa dampak positif cukup nyata di masa mendatang.

Data pada Tabel 4.7 menunjukkan data angka melek huruf kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai pada tahun 2013. Selama lima tahun terakhir, rata-rata angka melek huruf (AMH)

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan semakin meningkat, yakni sebesar 88,22 persen. Kota Makassar merupakan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang yang memiliki angka melek huruf tertinggi dengan nilai rata-rata dari tahun 2009 hingga 2013 sebesar 97 persen. Sedangkan Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang memiliki angka melek huruf terendah dengan nilai rata-rata dari tahun 2009 hingga 2013 sebesar 77,62 persen.

Tabel 4.7
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kep.Selayar	89,23	89,23	90,86	90,88	91,76
Bulukumba	85,35	85,35	85,45	86,26	88,23
Bantaeng	77,51	78,98	79,03	80,10	81,40
Jeneponto	77,20	77,27	77,31	77,42	78,92
Takalar	80,75	81,80	81,85	83,10	84,69
Gowa	80,27	81,92	82,32	82,50	83,11
Sinjai	86,45	86,45	86,59	86,71	88,44
Maros	82,90	82,97	83,10	83,98	85,52
Pangkep	86,86	87,55	87,59	88,82	90,21
Barru	88,48	89,23	89,25	89,31	89,55
Bone	84,85	84,86	86,41	87,88	89,04
Soppeng	85,08	86,67	86,71	86,99	88,74
Wajo	82,69	83,53	84,97	84,99	85,62
Sidrap	89,57	89,63	89,77	89,90	90,25
Pinrang	89,74	89,90	91,48	91,63	91,99
Enrekang	90,44	90,44	90,49	91,26	91,35
Luwu	91,48	91,48	91,63	91,70	91,82
Tana Toraja	85,45	86,28	87,76	88,94	90,14
Luwu Utara	92,05	92,36	92,86	92,99	93,11
Luwu Timur	93,24	93,24	93,28	93,43	93,87
Toraja Utara	83,03	83,80	83,83	85,85	87,38
Makassar	96,68	96,79	96,82	96,88	97,83
Pare Pare	97,06	97,16	97,17	97,33	97,36
Palopo	97,32	97,33	97,34	97,43	97,45

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013

Selain Angka Melek Huruf (AMH), indeks pendidikan juga ditunjang oleh angka Rata-rata Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah lama

sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas. Data pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2009 hingga 2013 adalah 7,6 tahun atau diatas lulusan sekolah dasar.

Tabel 4.8
Rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kep.Selayar	6.75	6.95	7.07	7.26	7,26
Bulukumba	6.69	6.97	7.11	7.11	7.17
Bantaeng	5.87	5.97	6.10	6.46	6.48
Jeneponto	5.88	6.20	6.23	6.23	6.27
Takalar	6.23	6.42	6.46	6.99	7,02
Gowa	6.57	6.83	7.23	7.24	7.37
Sinjai	6.71	6.74	7.07	7.08	7,1
Maros	6.50	6.62	6.90	7.08	7.27
Pangkep	6.61	6.73	6.94	7.07	7.22
Barru	7.39	7.61	7.62	7.87	7.89
Bone	6.38	6.70	6.72	6.72	6.73
Soppeng	6.98	7.25	7.28	7.29	7,37
Wajo	6.06	6.22	6.51	6.60	6.98
Sidrap	7.24	7.25	7.27	7.48	7.77
Pinrang	7.22	7.61	7.62	7.89	7.89
Enrekang	8.25	8.30	8.32	8.34	8.39
Luwu	7.71	7.74	7.80	7.81	7.94
Tana Toraja	7.46	7.70	7.74	7.83	8,26
Luwu Utara	7.04	7.46	7.49	7.49	7.51
Luwu Timur	7.75	8.17	8.18	8.19	8.21
Toraja Utara	7.03	7.22	7.67	7.86	7.88
Makassar	10.60	10.82	10.85	10.86	10,9
Pare Pare	9.63	9.63	9.76	9.88	9.91
Palopo	9.73	10.03	10.04	10.16	10.19

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013

Kota Makassar merupakan daerah yang memiliki angka rata-rata lama sekolah tertinggi selama lima tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan dengan

nilai rata-rata 10,8 tahun. Sedangkan Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang memiliki angka rata-rata lama sekolah terendah selama lima tahun terakhir di Provinsi Sulawesi selatan dengan nilai rata-rata 6,2 tahun.

Berdasarkan pada kedua kecenderungan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) seperti telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa wilayah perkotaan relatif memiliki angka yang lebih tinggi dalam pencapaian indeks pendidikan, baik untuk Angka Melek Huruf (AMH) maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang cenderung merupakan daerah pedesaan atau daerah pemekaran. Hal ini diduga terkait dengan kesadaran masyarakat kota yang lebih tinggi terhadap pendidikan dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan, selain itu sarana dan prasarana pendidikan di daerah perkotaan atau daerah otonom lama relatif lebih baik jika dibandingkan dengan daerah pemekaran baru.

4.2.1.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Angka harapan hidup merupakan tolak ukur indikator kesehatan. Faktor kesehatan merupakan indikator penting penunjang pembangunan manusia karena bila daya tahan tubuh baik maka akan meningkatkan produktivitas.

Data pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2013 angka harapan hidup (AHH) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara keseluruhan, dari tahun 2009 hingga tahun 2013 angka harapan hidup tertinggi di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Enrekang kemudian Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja dengan nilai rata-rata masing-masing kabupaten/kota ini adalah 75,18 tahun, 74,49 tahun dan 74,21 tahun. Sedangkan

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar dan Kabupaten Pangkep, berturut-turut merupakan daerah dengan angka harapan hidup terkecil di Provinsi Sulawesi dengan nilai rata-rata kabupaten/kota ini adalah 65,1 tahun, 67,9 tahun dan 68,9 tahun.

Tabel 4.9
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kep.Selayar	67.61	67.74	67.88	68.02	68,08
Bulukumba	71.62	71.94	72.13	72.32	72.62
Bantaeng	73.12	73.60	73.96	74.32	74.59
Jeneponto	64,85	65.00	65.15	65.31	65,4
Takalar	69.17	69.52	69.89	70.27	70.30
Gowa	71.43	71.61	71.78	71.96	72,04
Sinjai	71.61	71.99	72.24	72.50	72.83
Maros	71.71	72.30	72.76	73.22	73.55
Pangkep	68.62	68.79	68.96	69.14	69.16
Barru	68.54	68.85	69.05	69.24	69.52
Bone	69.35	69.73	70.00	70.26	70.56
Soppeng	71,52	71.63	71.74	71.85	71.93
Wajo	70.40	70.94	71.37	71.79	72.11
Sidrap	72.07	72.50	72.81	73.12	73,38
Pinrang	71.72	72.06	72.28	72.50	72.81
Enrekang	74.66	74.99	75.19	75.39	75.66
Luwu	73.25	73.70	74.04	74.14	74.68
Tana Toraja	74.13	74.17	74.22	74.26	74.28
Luwu Utara	71.34	71.56	71.68	71.81	72.03
Luwu Timur	70.84	70.95	71.06	71.29	71.29
Toraja Utara	73.49	73.54	73.58	73.62	73.66
Makassar	73.24	73.59	73.82	74.05	74,38
Pare Pare	73.92	74.27	74.49	74.71	75,04
Palopo	72.25	72.47	72.59	72.72	72.93

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan , Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013

Rata-rata angka harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga 2013 adalah sebesar tahun. Angka Harapan Hidup ketika lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun

tersebut (BPS, 2010). Dengan demikian dapat diartikan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk yang dilahirkan pada tahun 2009 hingga tahun 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah selama tahun.

4.2.1.3 Perkembangan Indikator Daya Beli Masyarakat (*Purchasing Power Parity*) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Kemampuan daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau yang dikenal dengan *income per capita*.

Penghitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang kemudian disesuaikan. Oleh karena itu, daya beli masyarakat suatu wilayah dapat dibandingkan dengan daya beli masyarakat di wilayah lain. Untuk melihat gambaran kemampuan daya beli masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari Tabel 4.10. Data pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan kemampuan daya beli masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2013, yakni sebesar Rp 634,85. Data Tabel 4.10 menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Utara, Kota Makassar, dan Kota Parepare merupakan daerah yang memiliki rata-rata kemampuan daya beli masyarakat tertinggi selama lima tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai rata-rata masing-masing Rp 653.240, Rp 651.860 dan Rp 644.170. Sedangkan Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Tana Toraja merupakan daerah yang memiliki rata-rata kemampuan daya beli masyarakat terendah selama lima tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai rata-rata masing-masing Rp 604.950, Rp 613.120, Rp 617.370.

Tabel 4.10
 Daya Beli Masyarakat (*Purchasing Power Parity*) Kabupaten/Kota di Provinsi
 Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kep.Selayar	624.31	627.69	629.31	632.86	636.53
Bulukumba	629.12	632.43	636.96	640.49	643.43
Bantaeng	633.92	634.22	637.55	639.50	642.77
Jeneponto	631,09	631.74	634.85	637.16	640.30
Takalar	631.82	632.01	634.87	637.03	640,22
Gowa	639.15	639.23	641.00	643.20	646.35
Sinjai	608.34	609.50	612.34	616.20	619.20
Maros	637.20	639.12	640.74	643.56	647.13
Pangkep	627.88	628.26	630.79	634.50	636,88
Barru	632.35	632.98	635.74	638.45	641.47
Bone	638.01	639.16	640.31	643.23	645,58
Soppeng	636,96	637.16	640.46	643.20	646,38
Wajo	637.22	639.49	640.11	644.40	647.99
Sidrap	627.99	628.61	630.64	634.02	637.24
Pinrang	637.37	638.49	639.83	643.01	645.86
Enrekang	624.74	626.63	628.53	630.59	632.76
Luwu	629.25	630.71	633.08	635.46	638.45
Tana Toraja	614.14	614.99	615.84	619.27	622.62
Luwu Utara	648.64	650.85	653.06	655.38	658.27
Luwu Timur	624.35	626.03	629.17	632.76	636,53
Toraja Utara	597.86	601.89	604.71	608.39	611,88
Makassar	646.96	649.12	651.28	654.25	657.68
Pare Pare	640.04	641.55	644.04	646.40	648,8
Palopo	633.02	634.17	637.12	640.30	643,94

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013

Data Tabel 4.10 menunjukkan bahwa antara satu daerah dan daerah yang lain memiliki kemampuan daya beli masyarakat yang tidak jauh berbeda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi ketimpangan antara satu daerah yang memiliki bentuk pemerintahan kabupaten dan kota. Kegiatan perekonomian perkotaan yang lebih maju memberikan dampak *trickle down effect* terhadap kegiatan perekonomian kabupaten, sehingga kemampuan daya beli masyarakat kabupaten menjadi meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat kota.

4.2.2 Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013

Belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan tiga dari sebelas jenis belanja pemerintah menurut fungsi. Ketiga belanja pemerintah menurut fungsi tersebut diprioritaskan pada pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan atas dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat. Diprioritaskannya belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan solusi atas ketertinggalan Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

4.2.2.1 Perkembangan Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMPD) Sulawesi Selatan tahun 2008-2013, sektor pendidikan bersama dengan sektor kesehatan menempati agenda pertama dari tujuh agenda pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah, pemerintah Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis di seluruh kabupaten/kota. Bersamaan dengan itu, juga telah dikembangkan berbagai kebijakan lainnya seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan pengembangan budaya baca.

Data pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa belanja bidang pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung berfluktuatif, meskipun relatif fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.

Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone merupakan tiga daerah dengan rata-rata belanja pada bidang pendidikan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 masing-masing sebesar Rp 593.697.000.000, Rp 351.360.000.000, dan Rp 343.749.000.000. Sedangkan Kabupaten Selayar, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Tana Toraja merupakan tiga daerah dengan rata-rata alokasi belanja di bidang pendidikan yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga 2013 masing-masing sebesar Rp 110.018.000.000, Rp 125.138.000.000 dan Rp 142.429.000.000.

Tabel 4.11
Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Belanja Pendidikan				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Bantaeng	116.627	117.643	165.214	155.714	234.332
Kab. Barru	154.640	165.595	215.420	233.105	272.863
Kab. Bone	227.402	233.296	271.992	493.643	492.411
Kab. Bulukumba	273.224	288.639	344.051	361.992	417.047
Kab. Enrekang	120.377	146.265	218.096	198.598	217.857
Kab. Gowa	284.216	276.677	334.777	394.090	467.038
Kab. Jeneponto	170.031	222.276	241.568	237.760	310.491
Kab. Luwu	176.575	175.469	222.132	250.366	305.940
Kab. Luwu Utara	163.262	146.630	190.744	259.703	252.261
Kab. Maros	154.895	160.273	230.469	226.796	364.107
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	194.470	200.657	298.754	337.959	383.775
Kab. Pinrang	176.061	203.209	250.907	298.655	339.272
Kab. Selayar	69.522	75.854	126.703	135.390	142.622
Kab. Sidenreng Rappang	190.148	190.776	264.573	286.163	277.378
Kab. Sinjai	160.493	170.991	240.432	281.268	297.450
Kab. Soppeng	119.542	113.752	239.316	307.144	325.946
Kab. Takalar	158.016	186.860	234.293	318.287	303.700
Kab. Tana Toraja	73.051	94.211	150.799	203.550	190.533
Kab. Wajo	167.750	143.978	239.787	298.791	308.536
Kota Pare-Pare	120.013	131.149	202.741	211.797	237.811
Kota Makassar	496.795	510.245	636.654	626.552	698.240
Kota Palopo	116.009	119.098	178.921	174.014	211.039
Kab. Luwu Timur	179.195	122.719	157.952	193.839	208.561
Kab. Toraja Utara	1.074	96.936	130.456	194.521	202.702

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (diolah)

4.2.2.2 Perkembangan Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013

Kesehatan merupakan kebutuhan penting dan sekaligus merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia agar mereka dapat sehat dan hidup secara produktif. Sektor kesehatan bersama dengan sektor pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas utama pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, dan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013, kedua sektor ini menempati agenda pertama dari tujuh agenda pembangunan daerah. Untuk menunjang program utama ini oleh pemerintah Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 telah mencanangkan suatu program kesehatan gratis dengan harapan bahwa dengan program tersebut paling tidak telah membawa dampak pada berkurangnya belanja masyarakat untuk kepentingan pembayaran kesehatan yang selama ini sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

Data pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa belanja bidang kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung berfluktuatif, meskipun relatif fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada Tabel 4.12 menunjukkan tiga daerah dengan rata-rata belanja bidang kesehatan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Luwu Timur masing-masing sebesar Rp 152.818.000.000, Rp 94.004.000.000, dan Rp 98.109.000.000. Sedangkan tiga daerah dengan rata-rata belanja terendah pada bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Selayar dan Kabupaten Bantaeng masing-masing sebesar Rp 26.610.000.000, Rp 41.111.000.000, dan Rp 47.769.000.000.

Tabel 4.12
Perkembangan Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Belanja Kesehatan				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Bantaeng	45.949	40.352	45.214	51.130	56.203
Kab. Barru	45.991	44.581	50.036	59.224	62.501
Kab. Bone	77.489	80.464	84.757	112.052	135.782
Kab. Bulukumba	51.973	66.422	72.995	71.751	78.638
Kab. Enrekang	65.703	47.757	56.781	57.817	77.724
Kab. Gowa	61.107	70.138	84.741	96.966	107.662
Kab. Jeneponto	40.356	46.782	60.952	81.194	93.759
Kab. Luwu	43.689	41.329	52.841	62.631	73.365
Kab. Luwu Utara	70.776	72.937	85.493	89.810	98.641
Kab. Maros	80.327	53.531	71.610	76.190	111.547
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	53.766	72.431	73.058	86.123	98.389
Kab. Pinrang	52.336	56.323	62.368	73.451	82.213
Kab. Selayar	36.408	34.361	39.261	39.458	56.069
Kab. Sidenreng Rappang	45.310	63.592	73.808	80.616	85.134
Kab. Sinjai	37.028	48.373	46.368	50.002	57.896
Kab. Soppeng	46.962	44.101	61.348	58.578	89.889
Kab. Takalar	49.258	57.559	65.407	78.380	95.751
Kab. Tana Toraja	43.044	50.701	53.164	65.683	77.564
Kab. Wajo	59.372	53.919	65.152	75.548	114.891
Kota Pare-Pare	62.839	65.153	75.846	101.779	100.272
Kota Makassar	106.010	109.973	148.443	190.444	209.218
Kota Palopo	42.062	65.579	70.478	71.967	75.840
Kab. Luwu Timur	102.953	63.008	87.203	106.071	110.783
Kab. Toraja Utara	2.777	22.244	27.883	37.910	42.235

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (diolah)

4.2.2.3 Perkembangan Belanja Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi

Selatan tahun 2009-2013

Untuk mengakselerasi pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat dikaji melalui pengalokasian dana yang telah dihimpun pemerintah daerah untuk berbagai belanja pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi

sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian daerah yang salah satunya adalah belanja ekonomi.

Tabel 4.13
Perkembangan Belanja Bidang Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Belanja Ekonomi				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Bantaeng	44.789	47.134	23.948	58.728	71.113
Kab. Barru	37.043	36.702	39.730	39.005	52.520
Kab. Bone	53.669	55.169	62.252	55.596	80.166
Kab. Bulukumba	42.671	43.311	49.131	54.157	64.695
Kab. Enrekang	45.926	39.889	47.800	46.635	54.127
Kab. Gowa	62.749	63.100	59.955	72.463	81.782
Kab. Jeneponto	40.163	63.321	70.231	94.167	82.495
Kab. Luwu	45.853	43.859	53.239	66.576	75.031
Kab. Luwu Utara	46.476	54.460	59.491	78.140	81.281
Kab. Maros	79.006	90.968	50.336	61.369	83.901
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	50.365	38.330	38.948	64.731	82.813
Kab. Pinrang	47.164	56.371	62.263	70.765	85.160
Kab. Selayar	43.362	39.554	42.139	42.341	73.804
Kab. Sidenreng Rappang	42.473	55.328	51.153	42.232	43.131
Kab. Sinjai	44.466	40.065	43.113	49.787	63.060
Kab. Soppeng	36.972	29.900	42.069	48.967	58.345
Kab. Takalar	51.186	45.074	55.858	61.794	75.700
Kab. Tana Toraja	51.482	54.979	62.045	67.372	75.184
Kab. Wajo	39.597	36.120	42.452	66.415	59.437
Kota Pare-Pare	29.144	28.743	30.827	43.685	41.583
Kota Makassar	54.978	50.675	70.650	78.540	98.848
Kota Palopo	31.565	31.100	38.721	46.231	58.634
Kab. Luwu Timur	72.412	51.640	83.939	90.453	85.683
Kab. Toraja Utara	8.299	44.845	50.484	60.313	74.772

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (diolah)

Tabel 4.13 menunjukkan belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada bidang Ekonomi dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Data menunjukkan bahwa belanja pada bidang ekonomi berfluktuasi tetapi dari tahun 2009 hingga tahun 2013 cenderung mengalami peningkatan.

Berdasarkan data pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa daerah yang dengan rata-rata belanja tertinggi pada bidang ekonomi dari tahun 2009 hingga

tahun 2013 adalah Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar masing-masing sebesar Rp 76.825.000.000, Rp 73.116.000.000, dan Rp 70.738.000.000. Sedangkan daerah dengan rata-rata belanja terendah pada bidang ekonomii pada tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kabupaten Barru, Kota Palopo, dan Kabupaten Soppeng masing-masing sebesar Rp 41.000.000.000, Rp 41.250.000.000, dan Rp 43.251.000.000.

4.3 Hasil Analisis Ekonometrika

Dari hasil regresi model Y_1 pengaruh variabel belanja pendidikan (X_1), belanja kesehatan (X_2), dan belanja ekonomi (X_3) terhadap indeks pembangunan manusia (Y_1) diperoleh dengan nilai R^2 sebesar 0,97. Hal ini berarti variabel-variabel independen yaitu belanja pendidikan (X_1), belanja kesehatan (X_2), dan belanja ekonomi (X_3) menjelaskan variasi indeks pembangunan manusia (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 97%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan di luar model sebesar 3%.

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh belanja pendidikan (X_1), belanja kesehatan (X_2), dan belanja ekonomi (X_3) terhadap indeks pembangunan manusia (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$), dari regresi pada lampiran 2c diperoleh probabilitas F statistik sebesar 0,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dependen bila nilai t statistik > nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t statistik yang lebih kecil dari alpha (α) 1%, 5 % atau 10%. Pengaruh belanja pendidikan (X_1), belanja

kesehatan (X_2), dan belanja ekonomi (X_3) terhadap indeks pembangunan manusia (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan taraf keyakinan 95% dan *degree of freedom* (23, 94) diperoleh t tabel sebesar 1,646. Dari lampiran 2c, dapat diketahui nilai t statistik variabel bebas belanja pendidikan (X_1) sebesar 0,005, nilai t statistik belanja kesehatan (X_2) sebesar 2,980, dan nilai t statistik belanja ekonomi (X_3) sebesar 1,919. Dari hasil regresi variabel bebas belanja pendidikan (X_1) memperlihatkan bahwa t statistik < t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas belanja pendidikan (X_1) tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y_1). Sedangkan kedua hasil regresi yaitu belanja kesehatan (X_2) dan belanja ekonomi (X_3) memperlihatkan bahwa t statistik > t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas tersebut secara individu signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y_1).

4.4 Analisis Hasil

Hasil interpretasi data pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 4.14. Berdasarkan penentuan model analisis pada lampiran 2a dan lampiran 2c maka berikut adalah ringkasan interpretasi data pada Tabel 4.14.

Dari Tabel 4.14 menunjukkan bahwa belanja pendidikan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 hingga tahun 2013. Hal ini terlihat pada Tabel 4.14 yang menunjukkan nilai probabilitasnya lebih dari 5% (0,05) yaitu 0,99 dan nilai koefisien X_1 menunjukkan angka 0,17. Yang artinya bahwa belanja pendidikan (X_1) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

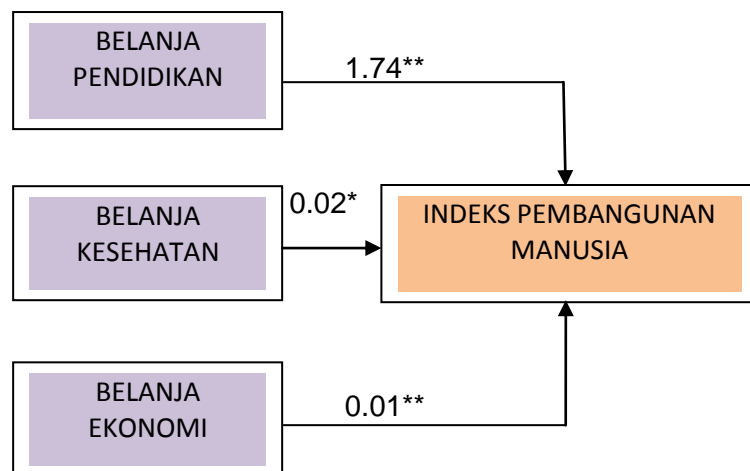
Tabel 4.14
Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2013

Variabel Bebas	Koefisien	Probabilitas	F Statistik	t Statistik	R squared	Pengaruh Variabel
X ₁	1.74E-05	0.9959	102.1076	0.005095	0.966155	Tidak signifikan
X ₂	0.017897	0.0037	102.1076	2.980406	0.966155	Positif dan signifikan
X ₃	0.010898	0.0580	102.1076	1.919407	0.966155	Tidak signifikan

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 8.0

Hasil regresi menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 hingga tahun 2013. Hal ini terlihat pada Tabel 4.14 yang menunjukkan nilai probabilitasnya kurang dari 5% (0,05) yaitu 0,00 dan nilai koefisien X₂ sebesar 0,02. Yang artinya bahwa belanja kesehatan (X₂) berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, data menunjukkan bahwa belanja ekonomi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009-2013. Hal ini terlihat pada Tabel 4.14 yang menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari alpha 5% (0,05) yaitu 0,06 dan nilai koefisien X₃ sebesar 0,01. Hal ini bahwa belanja ekonomi (X₃) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil dari interpretasi data tersebut jika dikembalikan pada kerangka konseptual, maka akan terlihat seperti pada Gambar 4.1



Gambar 4.1
Kerangka Pemikiran dengan Hasil Estimasi

Keterangan Gambar:

* : Signifikan pada $\alpha = 5\%$

** : Tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$

Gambar 4.1 memberikan informasi mengenai koefisien yang di peroleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dari hasil regresi yang telah dilakukan (lihat Lampiran 2c). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia dengan mengaitkan terhadap teori-teori ekonomi yang melandasi dan penelitian terkait sebelumnya.

Tabel 4.15
Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan
Ekonomi Tahun 2012-2013

Kabupaten/Kota	IPM		Belanja Pendidikan		Belanja Kesehatan		Belanja Ekonomi	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Kab. Bantaeng	71.51	72.22	155.714	234.332	51.130	56.203	58.728	71.113
Kab. Barru	71.70	72.16	233.105	272.863	59.224	62.501	39.005	52.520
Kab. Bone	71.47	72.08	493.643	492.411	112.052	135.782	55.596	80.166
Kab. Bulukumba	72.33	73.21	361.992	417.047	71.751	78.638	54.157	64.695
Kab. Enrekang	75.30	75.67	198.598	217.857	57.817	77.724	46.635	54.127
Kab. Gowa	71.60	72.12	394.090	467.038	96.966	107.662	72.463	81.782
Kab. Jeneponto	65.56	66.22	237.760	310.491	81.194	93.759	94.167	82.495
Kab. Luwu	74.68	75.33	250.366	305.940	62.631	73.365	66.576	75.031
Kab. Luwu Utara	74.97	75.36	259.703	252.261	89.810	98.641	78.140	81.281
Kab. Maros	72.54	73.48	226.796	364.107	76.190	111.547	61.369	83.901
Kab. Pangkep	70.65	71.26	337.959	383.775	86.123	98.389	64.731	82.813
Kab. Pinrang	74.39	74.87	298.655	339.272	73.451	82.213	70.765	85.160
Kab. Selayar	70.49	71.00	135.390	142.622	39.458	56.069	42.341	73.804
Kab. Sidenreng Rappang	73.36	74.05	286.163	277.378	80.616	85.134	42.232	43.131
Kab. Sinjai	70.64	71.45	281.268	297.450	50.002	57.896	49.787	63.060
Kab. Soppeng	72.57	73.31	307.144	325.946	58.578	89.889	48.967	58.345
Kab. Takalar	70.14	70.77	318.287	303.700	78.380	95.751	61.794	75.700
Kab. Tana Toraja	72.90	73.76	203.550	190.533	65.683	77.564	67.372	75.184
Kab. Wajo	71.67	72.55	298.791	308.536	75.548	114.891	66.415	59.437
Kota Pare-Pare	78.63	79.02	211.797	237.811	101.779	100.272	43.685	41.583
Kota Makassar	79.49	80.17	626.552	698.240	190.444	209.218	78.540	98.848
Kota Palopo	77.28	77.70	174.014	211.039	71.967	75.840	46.231	58.634
Kab. Luwu Timur	73.56	73.96	193.839	208.561	106.071	110.783	90.453	85.683
Kab. Toraja Utara	71.04	71.69	194.521	202.702	37.910	42.235	60.313	74.772

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (diolah)

4.5.1 Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun terlihat cenderung mengalami peningkatan. Namun hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan tahun 2009-2013 tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini berbeda

dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan meningkat maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sesuai dengan teori pengeluaran wagner, teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Belanja pendidikan yang relatif besar dan meningkat ini memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai pembangunan daerah khusus di bidang pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Disamping itu, menurut teori human capital bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk. Namun dalam penelitian ini hasilnya bertentangan dengan teori yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia daerah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013. Jika belanja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya maka hal ini tidak akan berdampak terhadap indeks pembangunan manusia yang akan terjadi pada masing-masing daerah. Secara teoritis belanja pendidikan diberikan kepada daerah dalam rangka membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah di bidang pendidikan. Data yang menunjukkan bahwa angka indeks pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sebesar 73,28 persen masih berada dibawah angka indeks pembangunan manusia nasional yang sebesar 73,29. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang mengukur

pemerataan akses terhadap pendidikan, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir merupakan 10 provinsi dengan APS terendah dengan kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal belum dirasakan oleh semua kalangan.

Dengan besarnya jumlah belanja pendidikan melalui adanya berbagai program bantuan dari pemerintah, seharusnya pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk. Namun kenyataannya belum semua penduduk dapat mengenyam pendidikan formal terutama pada kelompok penduduk miskin. Salah satu permasalahan pendidikan yang menghambat peningkatan kapabilitas dasar penduduk adalah mahalnya biaya pendidikan. Ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah yang berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalani (putus sekolah).

Kemudian permasalahan selanjutnya, minimnya sarana belajar mengajar dan susahya akses pelayanan pendidikan di kampung-kampung dan keterbatasan tenaga pendidik hal ini dibuktikan dengan angka melek huruf di perkotaan lebih baik dibanding di kabupaten di mana Makassar, Palopo, dan Pare-pare memiliki angka yang tertinggi. Sebaliknya, daerah Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Gowa, dan Takalar justru menunjukkan angka melek huruf yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan di tingkat kabupaten. Hal ini disebabkan oleh proporsi pemberian belanja pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih besar terhadap belanja pegawai dibandingkan proporsi belanja terhadap kegiatan yang akan berdampak langsung pada peningkatan IPM.

Selain itu, belanja pendidikan merupakan belanja yang memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan belanja kesehatan dan belanja ekonomi namun

terlihat pada indeks pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 73,28 yang masih berada dibawah indeks pembangunan nasional yaitu 73,29. Sebagaimana diketahui bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan bersifat seperti investasi yang tidak dapat langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang dikemukakan oleh Adi Widodo (2010) dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik dalam hal ini pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen. Variabel pengeluaran pemerintah harus berinteraksi dengan variabel lain. Selain itu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan yang akan menghasilkan perbaikan disektor pendidikan tidak dapat secara cepat mengubah kualitas angkatan kerja yang kemudian meningkatkan produktifitas kerja. Seharusnya menurut Todaro (2003) pengeluaran pemerintah yang ditujukan sebagai perbaikan modal manusia pada dasarnya merupakan suatu investasi. Juga bias dikarenakan dana untuk pembiayaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan pengalokasiannya belum efektif sehingga menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan seluruh daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berlomba-lomba untuk meningkatkan efektifitas sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah untuk mensejahterahkan rakyatnya dan agar perkembangan dan pertumbuhan daerahnya tidak tertinggal jauh oleh daerah lain. Kemudian mengupayakan berbagai program di bidang pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

4.5.2 Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Maksud dari pengaruh positif ini adalah mengindikasikan ada hubungan kuat antara belanja kesehatan dan indeks pembangunan manusia. Jika belanja kesehatan meningkat maka indeks pembangunan manusia akan ikut meningkat pula. Begitupun sebaliknya, indeks pembangunan manusia akan menurun di Provinsi Sulawesi Selatan jika belanja kesehatan menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan belanja kesehatan sebesar 1 persen hanya meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia sebesar 1.7 persen. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian, dimana jika belanja kesehatan meningkat maka akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara teori, hal ini didukung oleh teori yang terkait dengan pengeluaran wagner, teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat yang sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. Tren yang ditunjukkan oleh data belanja pemerintah di sektor kesehatan terjadi peningkatan yang cukup tajam. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian anggaran dan realisasi di sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan membaik seiring dengan peningkatan belanja kesehatan.

Beberapa perbaikan telah dicapai. Meski kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat. Namun, fasilitas kesehatan sudah cukup merata. Persentase desa dengan kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan semakin meningkat dari tahun 2008-2011. Hampir semua desa telah memiliki akses terhadap posyandu, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Selain itu akses terhadap

praktek dokter, praktek bidan, dan poskesdes juga tinggi. Data 2013 menunjukkan bahwa masih terdapat 14,84 persen rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, hanya terjadi penurunan sekitar 3 persen rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar. Sementara itu memiliki akses air bersih dari tahun 2011 hanya sebesar 62,65 persen meningkat menjadi 65,94 persen pada tahun 2013. Tahun 2011 persentase memiliki sanitasi layak sebesar 55,60 persen meningkat tahun 2013 sebesar 60,45 persen. Hal ini merupakan indikasi positif bahwa pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2013 terdapat 17,48 penduduk yang mengalami keluhan dan berobat sendiri. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2011 yaitu 19,58 persen. Pada Penurunan persentase penduduk yang berobat sendiri mengindikasikan bahwa kesadaran penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan semakin meningkat. Pada tahun 2011 kesenjangan persalinan yang aman antara penduduk pada kelompok termiskin dan terkaya sebesar 28,60 persen. Disparitas tersebut menurun hingga pada tahun 2012 menjadi 28,05 persen. Dalam jangka waktu tiga tahun (2001-2013) terlihat adanya peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan pada setiap kelompok penduduk. Kebijakan kesehatan gratis, telah berhasil membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Kebijakan kesehatan gratis juga berkontribusi terhadap perluasan cakupan layanan kesehatan, perbaikan kualitas layanan kesehatan, dan perluasan pola jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

4.5.3 Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil ini

berbeda dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi meningkat maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hal ini memperkuat anggapan bahwa belanja ekonomi belum memberikan kontribusi yang meyakinkan terhadap kinerja perekonomian daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, analisis regresi kelihatannya juga secara tidak langsung mengungkap bahwa pengeluaran atau belanja ekonomi cenderung mendorong kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik. Namun, masih sulit untuk membuktikan dampak positif terhadap kesejahteraan (IPM) karena hampir seluruh bidang cenderung merupakan investasi yang dampaknya baru akan terlihat dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan proporsi belanja ekonomi lebih banyak diberikan kepada belanja barang dan jasa dibandingkan proporsi belanja terhadap kegiatan yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

Selama periode 2011 hingga 2013, tren kemiskinan menunjukkan penurunan dari 12,36 persen pada tahun 2011 menjadi 11,47 persen pada tahun 2013. Meskipun terjadi peningkatan namun, penurunan kemiskinan cenderung bergerak lambat dan masih jauh dari target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan hingga 8 persen di tahun 2014. Karakteristik penduduk miskin umumnya tinggal di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian. Lebih dari 68 persen rumah tangga miskin di perdesaan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Pada periode 2011 hingga 2013, jumlah pengangguran telah berkurang. Meskipun secara kuantitas jumlahnya berkurang, kondisi tersebut menyembunyikan fakta bahwa pengangguran turun lambat. Pada periode 2011 hingga 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,56 persen menjadi 6,14 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan TPT relatif bagus pada periode ini. Namun, pada periode 2012 hingga 2013, TPT naik disbanding periode sebelumnya yaitu dari 6,14 persen menjadi 6,25 persen. Dari total

pengangguran pada tahun 2013, hampir 91 persen lebih penganggur berpendidikan di bawah SMA atau sederajat. Namun, sangat disayangkan bahwa hamper 3 persen penganggur berpendidikan Diploma I/II/III dan 5,5 persen berpendidikan Sarjana ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin memperoleh pekerjaan.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih tetap berjualan di pinggir jalan, dibawah terik mata hari, emperan toko dan terus tergusur dari pasar yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan pembangunan di bidang ekonomi hanya memberi manfaat kepada masyarakat golongan menengah ke atas. Selanjutnya, di beberapa daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat tertinggal, dimana sebagian besar penduduk masih hidup terisolir di daerah terpencil yang sulit dijangkau lewat transportasi darat dan harga barang-barang di Sulawesi Selatan masih terbilang tinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh biaya transportasi yang tinggi.

Sebagian belanja ekonomi cenderung mendorong kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik yang hanya berfokus pada daerah perkotaan sehingga tidak menyentuh masyarakat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagian besar tinggal di kampung. Hal ini sejalan dengan teori Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa kabupaten yang cenderung merupakan daerah otonom baru atau daerah pemekaran, sehingga pembangunan ekonomi masih berada di tahap awal dan tahap menengah.

Maka dari itu, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Sulawesi Selatan, harus bersama-sama mengawal pengimplementasian belanja ekonomi agar tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.

Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya memfokuskan pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi memperhatikan juga pembangunan di kampung-kampung agar dapat menyentuh masyarakat Sulawesi Selatan yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung. dimana akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masih sangat minim di kampung-kampung Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan pengalokasian belanja pemerintah di bidang pendidikan lebih besar diberikan kepada belanja pegawai dibanding proporsi belanja terhadap kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan IPM sehingga menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.
2. Belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), artinya jika belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan meningkat maka akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel belanja kesehatan merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah di sektor kesehatan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dengan tingginya perhatian pemerintah dalam pengalokasian pengeluaran di sektor kesehatan sehingga indikator dasar kesehatan membaik dan produktivitas penduduk ikut meningkat yang otomatis akan memicu peningkatan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.
3. Belanja ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan pengalokasian belanja

pemerintah di sektor ekonomi yang lebih besar terhadap belanja modal barang dan jasa dibanding proporsi belanja terhadap kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan IPM sehingga menyebabkan kelambanan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.

4. Rata-rata nilai IPM BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori IPM menengah tinggi yaitu dengan nilai sebesar 72,35. Daerah perkotaan memiliki perkembangan IPM dan komponen penyusun yang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi di daerah kabupaten. IPM tertinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar dengan nilai IPM 80,17. Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten dengan nilai IPM terendah dengan nilai IPM 66,22.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pengalokasian belanja pemerintah, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan alokasi yang lebih besar di bidang pendidikan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Melek Huruf (AMH), menurunkan angka putus sekolah, serta peningkatan sarana belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Dalam pengalokasian belanja pemerintah, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan alokasi yang lebih besar di bidang ekonomi untuk kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta peningkatan pemberdayaan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendekati fenomena sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ana Nurul. 2008. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman*. Skripsi UNP. Padang.
- Andrianus, Ferry. 2003. *Analisis Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (1970 – 2000)*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi "KOMPETISI". Vol. 1, No. 2, Mei 2003. Hal 124-140.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013 se-Provinsi Sulawesi Selatan*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2011. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2012. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2013. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2014. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2013. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Rajawali Press. Jakarta.
- Bastias Dwi, Desi. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Univeritas Diponegoro. Semarang.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Gujarati, D. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Zain S. [penerjemah]. Hutaaruk G. [editor]. Erlangga, Jakarta. Terjemahan dari : *Basic Econometrics*.
- Hari, Priyo Adi dan Fhino Andrea Christy. 2009. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. The third National Conference UKWMS. Surabaya.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow. 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*.

World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank. (Online), (<http://papers.ssrn.com>).

Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Ekonomi publik*, BPFE .Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat.

Mulyaningsih Yani. 2008. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan*. Jakarta.

National Human Development for Balize. 1997.

Patta, Devianti. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan periode 2001-2010*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Skripsi.

Putri, Febriani Irma. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Human Development Index (HDI) di Indonesia (Periode 1991-2008)*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Skripsi.

Situmorang, Armin Thurman. 2007. *Analisis Investasi Dalam Human Capital dan Akumulasi Modal Terhadap Peningkatan Produk Domestik*. Universitas Sumatera Utara.

Sulistio, Mirza Deni. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa tengah Tahun 2006-2009*. Universitas Negeri Semarang.

Tjiptoherijanto, P. 1997. *Prospek perekonomian Indonesia dalam rangka globalisasi*. Cet. 1. Rineka Cipta. Jakarta.

Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tomayah Nina dan syaikh usman. 2004. *Alokasi pendidikan di Era Otonomi daerah: Implikasinya terhadap pengelolaan pelayanan pendidikan dasar*. Laporan Lapangan. Jakarta.

Tri Haryanto, Unggul H dan Achmad Solihin. 2005. *Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja Sektor Pendidikan serta Kesehatan di Jawa Timur*. Majalah Ekonomi, Tahun XIV No.2, 2 Agustus 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya.

UNDP, 1990. *Human Development Report*. 1990. New York: Oxford University Press.

-----, 2003 . *Human Development Report 2003*. New York: Oxford University Press.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*.

- Vegirawati, Titin. 2012. *Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Wagiono, Yayah K. 1994. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Himpunan Makalah)*. Jakarta: Direktorat Jendral Perguruan Tinggi.
- Wahid A, Bilal. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2011*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Widodo, Adi., Waridin., Johanna Maria K. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Dipenogoro.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1**Hasil Rekap Data**

Daerah	Tahun	x1	x2	x3	y1
Bantaeng	2009	11,67	10,74	10,71	4,24
Bantaeng	2010	11,68	10,61	10,76	4,25
Bantaeng	2011	12,01	10,72	10,08	4,26
Bantaeng	2012	11,96	10,84	10,98	4,27
Bantaeng	2013	12,36	10,94	11,17	4,28
Barru	2009	11,95	10,74	10,52	4,25
Barru	2010	11,68	10,71	10,51	4,26
Barru	2011	12,01	10,82	10,59	4,27
Barru	2012	11,96	10,99	10,57	4,27
Barru	2013	12,36	11,04	10,87	4,28
Bone	2009	12,33	11,26	10,89	4,24
Bone	2010	12,02	11,30	10,92	4,25
Bone	2011	12,28	11,35	11,04	4,26
Bone	2012	12,36	11,63	10,93	4,27
Bone	2013	12,52	11,82	11,29	4,28
Bulukumba	2009	12,52	10,86	10,66	4,26
Bulukumba	2010	12,36	11,10	10,68	4,27
Bulukumba	2011	12,51	11,20	10,80	4,27
Bulukumba	2012	13,11	11,18	10,90	4,28
Bulukumba	2013	13,11	11,27	11,08	4,29
Enrekang	2009	11,70	11,09	10,73	4,31
Enrekang	2010	11,89	10,77	10,59	4,31
Enrekang	2011	12,29	10,95	10,77	4,32
Enrekang	2012	12,20	10,97	10,75	4,32
Enrekang	2013	12,29	11,26	10,90	4,33
Gowa	2009	12,56	11,02	11,05	4,25
Gowa	2010	12,53	11,16	11,05	4,26
Gowa	2011	12,72	11,35	11,00	4,27
Gowa	2012	12,88	11,48	11,19	4,27
Gowa	2013	13,05	11,59	11,31	4,28
Jeneponto	2009	12,04	10,61	10,60	4,17
Jeneponto	2010	12,31	10,75	11,06	4,17
Jeneponto	2011	12,39	11,02	11,16	4,18
Jeneponto	2012	12,38	11,30	11,45	4,18
Jeneponto	2013	12,65	11,45	11,32	4,19
Luwu	2009	12,08	10,68	10,73	4,30
Luwu	2010	12,08	10,63	10,69	4,30
Luwu	2011	12,31	10,88	10,88	4,31
Luwu	2012	12,43	11,05	11,11	4,31
Luwu	2013	12,63	11,20	11,23	4,32
Luwu Utara	2009	12,00	11,17	10,75	4,30

Luwu Utara	2010	11,90	11,20	10,91	4,31
Luwu Utara	2011	12,16	11,36	10,99	4,31
Luwu Utara	2012	12,47	11,41	11,27	4,32
Luwu Utara	2013	12,44	11,50	11,31	4,32
Maros	2009	11,95	11,29	11,28	4,26
Maros	2010	11,98	10,89	11,42	4,26
Maros	2011	12,35	11,18	10,83	4,27
Maros	2012	12,33	11,24	11,02	4,28
Maros	2013	12,81	11,62	11,34	4,30
Pangkajene Kepulauan	2009	12,18	10,89	10,83	4,24
Pangkajene Kepulauan	2010	12,21	11,19	10,55	4,24
Pangkajene Kepulauan	2011	12,61	11,20	10,57	4,25
Pangkajene Kepulauan	2012	12,73	11,36	11,08	4,26
Pangkajene Kepulauan	2013	12,86	11,50	11,32	4,27
Pinrang	2009	12,08	10,87	10,76	4,29
Pinrang	2010	12,22	10,94	10,94	4,29
Pinrang	2011	12,43	11,04	11,04	4,30
Pinrang	2012	12,61	11,20	11,17	4,31
Pinrang	2013	12,73	11,32	11,35	4,32
Selayar	2009	11,15	10,50	10,68	4,23
Selayar	2010	11,24	10,44	10,59	4,24
Selayar	2011	11,75	10,58	10,65	4,25
Selayar	2012	11,82	10,58	10,65	4,26
Selayar	2013	11,87	10,93	11,21	4,26
Sidenreng Rappang	2009	12,16	10,72	10,66	4,28
Sidenreng Rappang	2010	12,16	11,06	10,92	4,28
Sidenreng Rappang	2011	12,49	11,21	10,84	4,29
Sidenreng Rappang	2012	12,56	11,30	10,65	4,30
Sidenreng Rappang	2013	12,53	11,35	10,67	4,30
Sinjai	2009	11,99	10,52	10,70	4,24
Sinjai	2010	12,05	10,79	10,60	4,24
Sinjai	2011	12,39	10,74	10,67	4,25
Sinjai	2012	12,55	10,82	10,82	4,26
Sinjai	2013	12,60	10,97	11,05	4,27
Soppeng	2009	11,69	10,76	10,52	4,27
Soppeng	2010	11,64	10,69	10,31	4,27
Soppeng	2011	12,39	11,02	10,65	4,28
Soppeng	2012	12,64	10,98	10,80	4,28
Soppeng	2013	12,69	11,41	10,97	4,29
Takalar	2009	11,97	10,80	10,84	4,22
Takalar	2010	12,14	10,96	10,72	4,23

Takalar	2011	12,36	11,09	10,93	4,24
Takalar	2012	12,67	11,27	11,03	4,25
Takalar	2013	12,62	11,47	11,23	4,26
Tana Toraja	2009	11,20	11,47	10,85	4,27
Tana Toraja	2010	11,45	10,83	10,91	4,27
Tana Toraja	2011	11,92	10,88	11,04	4,28
Tana Toraja	2012	12,22	11,09	11,12	4,29
Tana Toraja	2013	12,16	11,26	11,23	4,30
Wajo	2009	12,03	10,99	10,59	4,24
Wajo	2010	11,88	10,90	10,49	4,25
Wajo	2011	12,39	11,08	10,66	4,26
Wajo	2012	12,61	11,23	11,10	4,27
Wajo	2013	12,64	11,65	10,99	4,28
Pare-pare	2009	11,70	11,05	10,28	4,35
Pare-pare	2010	11,78	11,08	10,27	4,35
Pare-pare	2011	12,22	11,24	10,34	4,36
Pare-pare	2012	12,26	11,53	10,68	4,36
Pare-pare	2013	12,38	11,52	10,64	4,37
Makassar	2009	13,12	11,57	10,91	4,36
Makassar	2010	13,14	11,61	10,83	4,37
Makassar	2011	13,36	11,91	11,17	4,37
Makassar	2012	13,35	12,16	11,27	4,38
Makassar	2013	13,46	12,25	11,50	4,38
Palopo	2009	11,66	10,65	10,36	4,33
Palopo	2010	11,69	11,09	10,34	4,34
Palopo	2011	12,09	11,16	10,56	4,34
Palopo	2012	12,07	11,18	10,74	4,35
Palopo	2013	12,26	11,24	10,98	4,35
Luwu Timur	2009	12,10	11,54	11,19	4,28
Luwu Timur	2010	11,72	11,05	10,85	4,29
Luwu Timur	2011	11,97	11,38	11,34	4,29
Luwu Timur	2012	12,17	11,57	11,41	4,30
Luwu Timur	2013	12,25	11,62	11,36	4,30
Toraja Utara	2009	6,98	7,93	9,02	4,23
Toraja Utara	2010	11,48	10,01	10,71	4,24
Toraja Utara	2011	11,78	10,24	10,83	4,25
Toraja Utara	2012	12,18	10,54	11,01	4,26
Toraja Utara	2013	12,22	10,65	11,22	4,27

Sumber : Data sekunder yang diolah dari excel 2010

Lampiran 2

Penentuan Model Analisis

Pada penelitian ini, penentuan metode analisis data panel yang digunakan merujuk pada beberapa hasil pengujian. Pengujian data panel yang digunakan antara lain (i) Chow Test (likelihood Ratio Test) untuk menentukan antara PLS atau FEM, (ii) Haussman Test untuk menentuka antara FEM atau REM.

2a Hasil uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	80.554643	(23,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	364.896814	23	0.0000

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 8.0

Hipotesis:

H0: Model PLS

H1: Model FEM

Kesimpulan:

Nilai F statistik adalah 80.55 dengan nilai tabel pada df (23,94) $\alpha = 0,05$ adalah 1,64 sehingga F statistik > F tabel, maka H0 di tolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

2b Hasil uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.423571	3	0.0153

Sumber: Data sekunder yang diolah dari EViews 8.0

Hipotesis:

H0: Model FEM

H1: Model REM

Kesimpulan:

Nilai probabilitas *cross section random* sebesar 0,015 dimana $\alpha = 0,05$ lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

2c Hasil pengujian perhitungan statistik pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y_1

Dependent Variable: Y1?					
Method: Pooled Least Squares					
Date: 02/16/15 Time: 00:22					
Sample: 2009 2013					
Included observations: 5					
Cross-sections included: 24					
Total pool (balanced) observations: 120					
<hr/>					
	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	X1?	1.74E-05	0.003407	0.005095	0.9959
	X2?	0.017897	0.006005	2.980406	0.0037
	X3?	0.010898	0.005678	1.919407	0.0580
	C	3.963802	0.038087	104.0724	0.0000
Fixed Effects (Cross)					
	_BANTAENG--C	-0.014337			

_BARRU—C	-0.007966
_BONE—C	-0.029188
_BULUKUMBA--C	-0.007105
_ENREKANG--C	0.038076
_GOWA—C	-0.023259
_JENEPONTO--C	-0.103533
_LUWU—C	0.031463
_LUWUUTARA--C	0.024946
_MAROS—C	-0.012097
_PANGKEP--C	-0.034162
_PINRANG--C	0.018327
_SELAYAR--C	-0.023527
_SIDRAP—C	0.008940
_SINJAI—C	-0.022819
_SOPPENG--C	0.003540
_TAKALAR--C	-0.043554
_TANATORAJA--C	-0.000354
_WAJO—C	-0.018950
_PAREPARE--C	0.079690
_MAKASSAR--C	0.073066
_PALOPO—C	0.064925
_LUWUTIMUR--C	0.001381
_TORAJAUTARA--C	-0.003504

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.966155	Mean dependent var	4.280658
Adjusted R-squared	0.956693	S.D. dependent var	0.042218
S.E. of regression	0.008786	Akaike info criterion	-6.436275

Sum squared resid	0.007179	Schwarz criterion	-5.809089
Log likelihood	413.1765	Hannan-Quinn criter.	-6.181572
F-statistic	102.1076	Durbin-Watson stat	1.050261
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 8.0

Lampiran 3**Surat Bukti Penelitian (BPS Provinsi Sulawesi Selatan)**

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI SULAWESI SELATAN**
Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125

Makassar, 05 Februari 2015

Nomor : 73560.010
Lampiran : -
Perihal : **Bukti Pengambilan Data**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Unhas
di-

Makassar

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Nomor : 180/UN4.5.1/PL.02/2015, tanggal 07 Januari 2015, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : **Ulfa Chaerunnisa Sunardi Awari**
NIM : A 11111022
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat/Tgl. Lahir : Bua/19 Mei 1993
Alamat : Komp. Budi Daya Permai Blok I/4 Makassar.

Benar telah mengambil data di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis dengan judul : **"Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan"**.

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Kasi Jaringin Rujukan Statistik



Telepon (0411) - 854838 (Sentral), 872879, Fax. (0411) - 851225
e-mail : sulsel@bps.go.id, website : <http://sulsel.bps.go.id>

Lampiran 4

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Ulfa Chaerunnisa Sunardi Awari
 Tempat, Tanggal Lahir : Bua/19 Mei 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Kompleks Budi Daya Permai Blok I/4
 Nomor HP : 089602828111/085298524924
 Alamat *E-mail* : ulfachaerunnisa@gmail.com



Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 1. SD Negeri 88 Salamae Palopo Tahun 1999-2005
 2. MTs Negeri Model Palopo Tahun 2005-2008
 3. SMA Negeri 3 Palopo Tahun 2008-2011
- Pendidikan Non Formal
 1. Pelatihan Basic Study Skill (BSS) Universitas Hasanuddin
 2. Pelatihan Kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin
 3. Training Ekonom Rabbani FoSEI Universitas Hasanuddin
 4. Diklat Ekonomi Islam (FoSEI) Universitas Hasanuddin
 5. ESQ Leadership Training
 6. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Universitas Hasanuddin
 7. Bushido 6 UKM Karate-Do Universitas Hasanuddin

Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Periode 2013-2014
2. Pengurus Forum Studi Ekonomi Islam (FoSEI) Universitas Hasanuddin Periode 2012-2013

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 11 Mei 2015

Ulfa Chaerunnisa Sunardi Awari